



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 061 / 228 / 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023-2024

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah perlu menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Handwritten signature

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Kudus Tahun 2023-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu Tahun 2023-2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 September 2023



Handwritten signature or mark at the bottom of the page.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 18 September 2023

Nomor : 061 / 228 / 2023

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

TAHUN 2023-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, merupakan sebuah kebutuhan ditengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan tujuan perbaikan pada tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat bisa dicapai melalui RB yang berkualitas dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional, dengan kata lain RB merupakan sebuah instrument dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari Road Map RB adalah sebagai berikut :

- 1) Substansi tujuan, sasaran dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya

saing pemerintahan, pemberantasan korupsi dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.

- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- 3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Tujuan dari *Road Map* RB setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut meliputi :

1) RB General

RB General berfokus pada penyelesaian isu hulu yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi yang umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani.

2) RB Tematik

RB Tematik berfokus pada penyelesaian isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Pelaksanaan RB tematik terdiri dari *leading sector*, *implementating agency* dan *non implementating agency*.

Handwritten signature

1.2. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah menjadi pedoman para pemangku kepentingan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Kudus Tahun 2023-2024.



BAB II

GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

2.1. Gambaran Umum

Gambaran kondisi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menjalankan roda pemerintahan didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah dan 1 (satu) Unit Organisasi Bersifat Khusus dengan jumlah Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 sebanyak 6.268 (enam ribu dua ratus enam puluh delapan) yang terdiri dari 5.702 (lima ribu tujuh ratus dua) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 566 (lima ratus enam puluh enam) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

2.1.1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam kurun waktu perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun, visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dirumuskan dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran umum pengelolaan keuangan daerah dan analisis isu strategis. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut : “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera” Makna yang terkandung di dalam visi tersebut adalah agar Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya, yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera.

2.1.2 MISI

Rumusan misi pembangunan Kabupaten Kudus periode tahun 2018-2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia dengan tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Pada misi yang pertama ini terdapat 3 (tiga) sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - c. Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat

At 11

Pada ke 3 (tiga) sasaran tersebut memiliki 7 (tujuh) indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Target dan capaian selama 5 (lima) tahun sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Target IKU sumber daya manusia yang berkualitas

Sasaran	IKU	Kondisi Awal 2018	Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
			Target	Target	Target	Target	Target	
Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah	13,58	13,97	14,20	14,44	14,64	14,90	14,90
	Rata-rata lama sekolah	8,33	8,45	8,50	8,70	9,01	9,20	9,20
	Persentase akses dan mutu Pendidikan	86,84	87,07	87,31	87,54	87,77	88,00	88,00
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	76,46	76,48	76,49	76,51	76,52	76,54	76,54
	Angka Kematian Ibu	65,97	65,97	59,27	59,27	52,78	52,78	52,78
	Angka Kematian Bayi	8	7,80	7,5	7,3	7,1	6,9	6,9
Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu)	10.706,45	10.847,79	10.989,14	11.130,49	11.271,84	11.413,19	11.413,19

Tabel 2.2
Capaian IKU sumber daya manusia yang berkualitas

Sasaran	IKU	Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	
Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah	13,22	13,23	13,24	13,24	-	-
	Rata-rata lama sekolah	8,45	8,5	8,7	8,7	-	-
	Persentase akses dan mutu Pendidikan	87,59	90,63	87	90,43	-	-
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	76,5	76,6	76,68	76,68	-	-
	Angka Kematian Ibu	72,90	135,40	150,95	88,24	-	-
	Angka Kematian Bayi	9,54	9,27	7,62	9,35	-	-
Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu)	11.318,00	11.272,00	11.272,00	11.272,00	-	-

2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan pubik dengan tujuan terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dan memiliki indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Pada misi yang kedua ini, sasarannya yaitu meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Handwritten signature

Pada sasaran meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi memiliki 4 (empat) indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Target dan capaiannya selama 5 (lima) tahun sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Target IKU kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Sasaran	IKU	Kondisi Awal 2018	Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
			Target	Target	Target	Target	Target	
Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	67,05	69,17	74	79	85	90	90
	Nilai akuntabilitas kinerja	68,19	70,50	72,50	75,00	81,00	83,00	83,00
	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,92	2,13	2,35	2,56	2,68	2,87	2,87
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM	80	81,5	82	83	83,5	85	85

Tabel 2.4
Capaian IKU kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Sasaran	IKU	Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	
Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	59,35	67,26	67,52	69,21	-	-
	Nilai akuntabilitas kinerja	66,36	68,93	69,45	71,13	-	-
	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,73	3,08	2,53	3,38	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM	82,45	86,88	86,88	88,31	-	-

3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif dengan tujuan terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan dan memiliki indikator tujuan yaitu Angka Kriminalitas.
- Pada misi yang ketiga ini, sasarannya yaitu meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama.

Handwritten signature

Pada sasaran meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama memiliki 2 (dua) indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Target dan capaiannya selama 5 (lima) tahun sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Target IKU terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan

Sasaran	IKU	Kondisi Awal 2018	Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
			Target	Target	Target	Target	Target	
Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama.	Indeks rasa aman	0,51	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	Indeks Toleransi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.6
Capaian IKU terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan

Sasaran	IKU	Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	
Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama.	Indeks rasa aman	0,84	0,55	0,44	0,86	-	-
	Indeks Toleransi	100%	91,67%	91,67%	100%	-	-

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing dengan tujuan terwujudnya peningkatan perekonomian daerah dan memiliki indikator tujuan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau.
- Pada indikator pertumbuhan ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau memiliki empat sasaran yaitu :
- a. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan indikator sasaran PDRB Perkapita, Angka kemiskinan dan Angka pengangguran.
 - b. Meningkatnya daya saing investasi daerah dengan indikator sasaran Nilai investasi.
 - c. Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah dengan indikator sasaran Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap

4 11

d. Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan indikator sasaran Indeks kualitas lingkungan hidup.

Target dan capaian pada keempat sasaran dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 pada misi ke-4 selama 5 (lima) tahun sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.7
Target IKU peningkatan perekonomian daerah

Sasaran	IKU	Kondisi Awal 2018	Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
			Target	Target	Target	Target	Target	
Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	113,8	121,86	128,03	134	139,78	144,87	144,87
	Angka Kemiskinan	6,98	6,7	6,45	6,21	6,1	5,9	5,9
	Angka Pengangguran	3,33	3,30	3,25	3,15	3,05	2,90	2,90
Meningkatnya daya saing investasi daerah Nilai investasi	Nilai investasi (dalam triliun Rp)	7,03	7,59	7,74	8,34	8,79	9,19	9,19
Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	78,61	79,71	80,72	81,72	82,72	83,73	83,73
Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	60,70	62,92	64,13	65,34	66,56	67,77	67,77

Tabel 2.8
Capaian IKU peningkatan perekonomian daerah

Sasaran	IKU	Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	
Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	121,36	126,65	126,65	126,95	-	-
	Angka Kemiskinan	6,68	7,60	7,60	7,41	-	-
	Angka Pengangguran	3,86	3,77	3,77	3,21	-	-
Meningkatnya daya saing investasi daerah Nilai investasi	Meningkatnya daya saing investasi daerah Nilai investasi	5,866	39,44	39,44	10,30	-	-
Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	80,23	83,60	83,60	84,86	-	-
Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,75	64,67	62,76	54,88	-	-

24/11

2.2. Kondisi eksisting sesuai dengan Road Map RB 2023-2024

2.2.1. Capaian Tujuan dan Sasaran RB, Kegiatan Utama dan Indikator-indikator RB

Tabel 2.9

Tujuan, Sasaran, Kegiatan Utama dan Indikator RB

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang lincah, kolaboratif, dan Akuntabel	Terimplementasikannya kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / Transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	89%	89%
		Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN	10%	10%
		Terimplementasikannya kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,68	3,38
		Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendukung Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Nilai SAKIP Indeks Perencanaan Pembangunan	81 -	71,13 -
		Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digitas Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Presentase layanan publik digital	70%	72,32%
				Tingkat implementasi MPP Digital	-	-
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan		Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat perolehan predikat WBK/WBBM	2	2
				Pencanangan Zona Integritas (ZI)	53	53
		Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)		Skor SPIP	3,4	3,011

791

		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Persentase layanan komunikasi dan informasi publik (pengaduan masyarakat)	100%	100%
		Penguatan upaya pencegahan korupsi	Indeks pencegahan korupsi daerah (MCP)	92,08	92,02
			Nilai Survey Penilaian Integeritas (KPK)	75,2	75,2
			Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	3,011
			Indeks Management Resiko (MRI)	-	2.750
			Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	-	2.362
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Tingkat kualitas kebijakan publik	-	44,46
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks reformasi hukum Nasional	-	31,55
			Indeks reformasi hukum mandiri	-	55,6
	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat penggunaan arsip digital	-	-
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat penyelenggaraan Data Statistik Sektoral	-	2,07
	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks tata kelola pengadaan	66,60	70,70
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Kualitas Pengelolaan Anggaran	WTP	WTP
			Tingkat Pengelolaan Aset	-	-

Art

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat implementasi kebijakan transformasi jabatan fungsional	89%	89%
		Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi manajemen talenta ASN	51,22	51,22
		Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	-	Tingkat implementasi kebijakan system pembelajaran terintegrasi ASN	-	-
		Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	-	Tingkat kepatuhan implementasi rekrutmen pegawai ASN sesuai kebijakan perencanaan dan pengadaan	90%	90%
		Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	-	Tingkat implementasi platform digital ekosistem	-	-
	Terwujudnya system kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja		Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN	50%	50%
	Meningkatnya kepatuhan terhadap system merit dan system manajemen ASN		Penguatan Sistem Merit	Indeks system merit (integrasi dengan indeks profesionalisme ASN dan indeks NSPK)	-	50,01
			Pelaksanaan Core Value ASN	Survei Nilai Employer Branding dan Indeks BerAKHLAK	-	62,10%
			Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks pelayanan publik (integrasi IPP dengan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI)	-	4,19

Handwritten signature/initials

Pada tahun 2022 dari 21 (dua puluh satu) Kegiatan Utama (KU) hampir seluruh capaian pada indikator kegiatan utama sudah sesuai bahkan melebihi target, namun masih ada yang belum tercapai yaitu pada indikator Nilai SAKIP sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10
Capaian tidak sesuai Target 2022

Kegiatan Utama (KU)	Indikator KU	Target 2022	Capaian 2022	Penyebab tidak tercapai
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	81	71,13	Tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja masih belum optimal serta masa transisi ke RPD 2024-2026

BAB III
AGENDA RB INSTANSI PEMERINTAH

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran RB

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RB

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN
Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan public	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi
		Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN dengan baik
		Terimplentasikannya kebijakan Arsitektur SPBE Nasional
		Terimplentasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi
		Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistic sectoral

		Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset
	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional
		Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien
		Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN
		Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien
		Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN
		Terwujudnya system kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja
		Meningkatnya kepatuhan terhadap system merit dan sistem manajemen ASN

3.2. Perencanaan RB General

3.2.1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Kabupaten Kudus telah menetapkan prioritas kegiatan utama dengan mengambil seluruh Kegiatan Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sejumlah 21 (dua puluh satu) Kegiatan Utama (KU) sebagaimana tersebut dibawah ini.

Tabel 3.2
Kegiatan Utama (KU)

No	Kegiatan Utama (KU)	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (implementasi rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi / Transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>)	10	5	5	20
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN	10	5	6	21

4871

No	Kegiatan Utama (KU)	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparaharan (implementasi rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Daerah	10	5	8	23
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	10	5	6	21
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	5	5	20
6	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	10	8	7	25
7	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	10	7	8	25
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	6	8	24
9	Indeks pencegahan korupsi daerah (MCP)	10	7	9	26
	Nilai Survey Penilaian Integeritas (KPK)	10	6	9	25
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	10	6	9	25
	Indeks Management Resiko (MRI)	10	6	9	25
	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	10	6	9	25
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	4	5	19
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	10	3	3	16
12	Pelaksanaan Arsip Digital	10	7	8	25
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	6	8	24

471

No	Kegiatan Utama (KU)	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (implementasi rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	3	6	18
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	6	5	21
16	Penataan Jabatan Fungsional	10	5	8	23
17	Penguatan Manajemen Talenta	10	4	6	20
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	4	6	20
19	Penguatan Sistem Merit	10	3	6	19
20	Pelaksanaan Core Values ASN	10	4	6	20
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	3	5	18

48 91

3.2.2 Penetapan Target Kegiatan Utama

Tabel 3.3
Penetapan Target Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama (KU)	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	
				2023	2024
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / Transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	89%	90%	90%
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	10%	50%	80%
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,38	3,4	3,5
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	69,21	90	70
5	Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Nilai SAKIP	71,13	83	71,3
6	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Indeks Perencanaan Pembangunan Presentase layanan publik digital	- 72,32%	100%	100%
7	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat implementasi MPP Digital	0	5%	25%
8	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Tingkat perolehan predikat WBK/WBBM	2	3	5
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Pencanangan Zona Integritas (ZI)	53	53	53
9	Penguatan upaya pencegahan korupsi	Skor SPIP	3,011	3,12	3,2
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Persentase layanan komunikasi dan informasi publik (pengaduan masyarakat)	100%	100%	100%
		Indeks pencegahan korupsi daerah (MCP)	92,08	93	94
		Nilai Survey Penilaian Integritas (KPK)	75,2	76,5	78,8
		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,011	3,12	3,20
		Indeks Management Resiko (MRI)	2.750	2.800	3.000
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2.362	2.400	2.600
		Tingkat kualitas kebijakan publik	44,46	45	50

AS

No	Kegiatan Utama (KU)	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan	
				2023	2024
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks reformasi hukum Nasional	31,55	35	40
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Indeks reformasi hukum mandiri	55,60	60	65
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat penggunaan arsip digital	-	100 %	100 %
		Tingkat penyelenggaraan Data Statistik Sektoral	2,07	2,7	2,8
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks tata kelola pengadaan	66,60	82,15	85,60
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Kualitas Pengelolaan Anggaran	WTP	WTP	WTP
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Pengelolaan Aset	-	-	-
		Tingkat implementasi kebijakan transformasi jabatan fungsional	80%	90%	90%
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi manajemen talenta ASN	51,25%	57,69%	62,50%
		Tingkat implementasi kebijakan system pembelajaran terintegrasi ASN	-	50%	75%
		Tingkat kepatuhan implementasi rekrutmen pegawai ASN sesuai kebijakan perencanaan dan pengadaan	90%	90%	90%
		Tingkat implementasi platform digital ekosistem	-	50%	100%
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN	50%	50%	100%
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks system merit (integrasi dengan indeks profesionalisme ASN dan indeks NSPK)	50,01	53,14	56,27
20	Pelaksanaan Core Value ASN	Survei Nilai Employer Branding dan Indeks BerAKHLAK	62,1	63	65
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks pelayanan publik (integrasi IPP dengan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan public oleh Ombudsman RI)	4,19	4,22	4,25

AS 71

3.3. Penetapan Tema dan Target RB Tematik

No	Tema	Kondisi Eksisting	Target	Kesesuaian Prioritas RPJMD	Keparahan Masalah	Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi yang Dimiliki	Percepatan Kinerja	Nilai Total
1	Kemiskinan	7,41%	6,96%	10	6	7	7	6	36
2	Investasi	1.086 M	1.108 M	8	5	6	5	7	31
3	Digitalisasi Pemerintahan	85,95 indeks	87,00 indeks	8	5	6	5	7	31
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	61,5%	65%	0	6	8	6	7	27
5	Inflasi	1,64 per Agustus	3,5 +/-1	7	5	8	7	8	35

Ma X 7h

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN RB

4.1. Pelaksanaan RB

4.1.1 Reformasi Birokrasi General

Reformasi Birokrasi General terdiri atas 21 (dua puluh satu Kegiatan Utama (KU) dengan koordinator pelaksana Kegiatan Utama (KU) sebagaimana tersebut dibawah ini.

Tabel 4.1

Koordinator Kegiatan Utama (KU) RB General

No	Kegiatan Utama (KU)	Koordinator Kegiatan Utama (KU)
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / Transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Bagian Organisasi
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN	Bagian Organisasi
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Bagian Organisasi, Bappeda, BPPKAD dan Inspektorat
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Bagian Organisasi, DPMPTSP dan Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Inspektorat
7	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Inspektorat
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Penguatan upaya pencegahan korupsi	Inspektorat
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Bagian Hukum
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Dinas Arsip dan Perpustakaan
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

A 1 71

15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	BPPKAD
16	Penataan Jabatan Fungsional	BKPSDM dan Bagian Organisasi
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	BKPSDM
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	BKPSDM dan Bagian Administrasi Pembangunan
19	Penguatan Sistem Merit	BKPSDM
20	Pelaksanaan Core Value ASN	Bagian Organisasi
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Bagian Organisasi

4.1.2. Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik terdiri atas 5 (lima) Tema dengan koordinator pelaksana tema sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.2

Koordinator Kegiatan Utama (KU) RB Tematik

No	Tema	Koordinator Tema	Anggota
1	Kemiskinan	Bappeda	a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga b. Dinas Kesehatan c. Dinas Sosial, P3AP2KB d. Dinas PKPLH e. Dinas Nakeperinkop UKM f. Dinas Perdagangan g. Dinas PMD h. Dinas PUPR
2	Investasi	DPMPTSP	a. Dinas PUPR b. Dinas Perdagangan c. Dinas Nakeperinkop UKM d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata e. Dinas Pertanian dan Pangan f. Dinas Kesehatan dan g. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3	Digitaslisasi Pemerintahan (Stunting)	Dinas Kominfo	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Sosial, P3AP2KB c. Dinas PMD
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Nakeprinkop dan UKM	a. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa b. Inspektorat
5	Inflasi	Bagian Perekonomian	a. Dinas Perdagangan b. Dinas Nakeperinkop UKM c. Dinas Perhubungan d. Dinas PUPR e. Dinas Pertanian dan Pangan

4.2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB

4.2.1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi mencakup pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Perangkat Daerah Pengampu dengan leading sektor Sekretaris Daerah c.q. Bagian Organisasi yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun.

Tabel 4.3

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Monitoring dan Evaluasi	Pelaksana	Waktu
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General	Tim Gabungan dengan leading sektor Sekretaris Daerah c.q. Bagian Organisasi	Secara Terjadwal pada Tahun Berjalan
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik2	Tim Gabungan dengan leading sektor Sekretaris Daerah c.q. Bagian Organisasi	Secara Terjadwal pada Tahun Berjalan

4.2.2. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Instrumen yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi, baik untuk RB General maupun RB Tematik adalah Dokumen Rencana Aksi pada RB General dan RB Tematik.

Tabel 4.4

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Tingkatan Monev	Instrumen Monev
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General	Dokumen Rencana Aksi pada RB General
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik	Dokumen Rencana Aksi pada RB Tematik

4.2.3. Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Laporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi capaian Reformasi Birokrasi dan langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan.

Tabel 4.5

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Aktivitas	Penyampaian Laporan	Waktu Pelaporan
1	Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Disampaikan kepada : a. Bupati b. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku penanggungjawab Reformasi Birokrasi Kabupaten Kudus	Setiap triwulan pada bulan pertama triwulan berikutnya
2	Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi	Tindaklanjut terhadap : Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Generaal dan Tematik Kabupaten Kudus	Tindaklanjut dilakukan penanganan segera setelah disampaikan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi

471

BAB V
PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi, merupakan rencana rinci atas misi ke 2 (dua) Bupati Kudus yaitu mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik dengan tujuan terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif yang diukur keberhasilannya dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

Perlunya disusun Road Map Reformasi Birokrasi, tidak hanya semata-mata memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, akan tetapi diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan dapat berjalan secara sinergis, berkesinambungan terencana dan terukur.

Dokumen ini tidak akan memiliki makna, jika seluruh strategi dan kebijakan serta rencana aksi yang telah dituangkan tidak dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh rencana yang telah dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi tersebut. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kepada Pimpinan secara berkala dan berkesinambungan, agar capaian dan kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diketahui dan diantisipasi secara dini apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.



A49k